

Request for Proposals

Title: Konsultan untuk Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Kabupaten Sorong Selatan

RFP No: 003/VI/12/2025

Date of Issuance: 18 Juni 2025

Informasi Project

Outcome	<i>2.1 Forest-positive livelihood of the local indigenous people developed through provisioning of production tools, establishment of community-enterprise entity, capacity building in product development and business management, and assistance in market development.</i>
Output	2.1.1 Communities have improved capacity in business management, through facilitation in business entity development, production permit acquisition, and capacity building in business management (finance, administration, workforce management) etc.

A. Latar Belakang

Berada pada bentang “kepala burung” Pulau Papua, Kabupaten Sorong Selatan memiliki ekosistem hutan tropis dengan keanekaragaman hayati tinggi yang harus dilindungi. Hal ini sesuai dengan hasil analisa pada tahun 2023 oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) yang menyebutkan bahwa dari 654.900 Ha luasan Sorong Selatan, 497.522 Ha-nya teridentifikasi sebagai area dengan nilai biodiversitas tinggi. Kawasan hutan ini tidak hanya menjadi tempat tinggal bagi fauna dan flora endemik, tetapi juga merupakan jantung kehidupan yang menghidupi masyarakat adat dan menjadi rumah yang secara harmoni, melalui tradisi terus dijaga keberadaannya oleh masyarakat.

Saat ini kawasan hutan di Sorong Selatan menghadapi sejumlah ancaman dari tekanan luar untuk mengeksploitasi hutan dengan berbagai kepentingan dalam skala yang sangat besar. Untuk itu pengelolaan kawasan hutan secara kolaboratif menjadi salah satu langkah upaya yang dibutuhkan untuk memastikan efektivitas perlindungan dan pemanfaatan kawasan hutan secara berkelanjutan oleh para pihak, terutama oleh masyarakat adat pemilik hak ulayat.

Umumnya suatu wilayah konservasi hutan akan efektif apabila masyarakat adat dapat merasakan dampak sosial ekonomi dengan keberadaan kawasan konservasi tersebut. Salah satu sektor ekonomi yang bila pengelolaannya dilakukan secara berkelanjutan akan menghasilkan manfaat ekonomi yang besar adalah sektor pariwisata. Pariwisata sebagai salah satu sektor utama di Indonesia memiliki nilai dan peluang bagi pembangunan ekonomi lokal di era global. Hasil survei yang dilakukan oleh para ahli

pada 2023 dan 2024 menjelaskan bahwa sektor pariwisata Indonesia saat ini terus menunjukkan tren positif, dengan fokus utama pada *cultural immersion*, *health and wellness tourism*, dan *eco-tourism*. Tren ini diprediksikan akan semakin mendominasi industri pariwisata dimasa mendatang, sekaligus mendukung sektor ini sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dengan tren yang berkembang saat ini, konsep desa wisata menjadi bentuk wisata alternatif yang menawarkan *experience* yang mendalam dan berbeda dari wisata *konvensional* dengan menyuguhkan keindahan alam, kehidupan sosial, dan budaya. Oleh karena itu keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di desa menjadi hal yang amat penting. Membangun pariwisata yang berkelanjutan haruslah berdasarkan pada prinsip kehati-hatian.

Saat ini Konservasi Indonesia (KI) sebagai yayasan nasional yang bertujuan mendukung pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan di Indonesia tengah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Sorong Selatan untuk mewujudkan pariwisata Sorong Selatan yang berkelanjutan. KI melihat potensi ekowisata berbasis jasa lingkungan hutan pada wilayah yang sudah dijaga dan dikelola oleh masyarakat adat. Dua model pengembangan pariwisata yang menjadi fokus KI saat ini adalah pengembangan (eko)wisata sungai dan pengamatan satwa di Kampung Klaugin yang berada pada wilayah sub-suku Tehit-KNASAIMOS, serta pengembangan (edu)wisata damar yang mengintegrasikan antara aktivitas pembelajaran tentang hutan adat dan pengalaman wisata alam serta budaya di Kampung Bariat dan Nakna pada wilayah sub-suku Afsya dan Nakna di Kabupaten Sorong Selatan.

B. Gambaran Umum Kegiatan

Tujuan utama pengembangan Usaha Pariwisata Berkelanjutan ini adalah agar masyarakat adat dapat secara mandiri mengelola dan melindungi potensi sumber daya alam dan budaya yang dimiliki melalui penyediaan jasa lingkungan pengembangan wisata dengan tata kelola yang baik, produk wisata yang berkualitas, segmen pasar yang kuat serta kompatibel terhadap akses pendanaan berkelanjutan. Maka itu dibutuhkan konsultan (pakar) yang memiliki keahlian untuk menganalisis peluang pengembangan usaha wisata dan melakukan rangkaian proses strategis untuk memastikan optimalisasi pengembangan usaha wisata, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja baru dan menjaga keberlanjutan lingkungan di Sorong Selatan.

C. Lingkup Kawasan

Kegiatan ini meliputi 2 (dua) model pengembangan wisata di 3 (tiga) kampung yaitu;

1. Pengembangan (eko)wisata sungai, atraksi budaya serta pengamatan satwa di Kampung Klaogin.
2. Pengembangan (eko)wisata budaya yang mengintegrasikan antara aktivitas pembelajaran tentang hutan Adat/Desa, pengalaman produksi sagu dan pengalaman wisata alam di Kampung Bariat dan Kampung Nakna, Distrik Konda.

D. Aktivitas dan Luaran Kegiatan

Rincian tugas dan capaian kegiatan konsultan disajikan pada table dibawah:

No	Luaran	Waktu	Aktivitas	Nilai (IDR)
1.	Rencana kerja dan kerangka kerja.	01/07/2025	a. Menyusun rencana kerja dan kerangka kerja termasuk pendekatan, metodologi, rencana kerja, kebutuhan pengembangan kapasitas dan kebutuhan data. b. Melampirkan catatan diskusi internal dan rapat – rapat yang dilakukan bersama para pihak.	10%
2.	Dokumen Panduan Pengelolaan daya Tarik wisata berkelanjutan yang berisi: a. Teknik dan SoP Pengembangan terkait pengelolaan daya Tarik wisata, pengelolaan kelembagaan dan penyelenggaraan paket wisata dengan mengintegrasikan praktik-praktik kearifan lokal, kekayaan sumber daya alam berkelanjutan dan teknologi serta ilmu pengetahuan terbaru termasuk petunjuk dalam menghasilkan produk	30/07/2025	Pembuatan modul dengan: a. Mengkaji potensi pengembangan usaha wisata baik dari sisi daya tarik wisata, fasilitas, aksesibilitas, kelembagaan, dan daya dukung Pariwisata Berkelanjutan. Termasuk menyusun SoP, kode etik wisatawan dan peningkatan kualitas produk wisata. b. Mengidentifikasi kelembagaan yang ada dan strategi tata kelola kelembagaan pengembangan wisata yang berkualitas. c. Mengidentifikasi dan membangun strategi pariwisata setempat melalui sharing profit sebagian untuk biaya	10%



	wisata berkelanjutan yang berkualitas. b. Dokumen Pembelajaran terkait strategi, prosedur dan proses tata kelola kelembagaan untuk pengembangan produk wisata berkelanjutan. c. Dokumen strategi pengembangan wisata ke dalam skema <i>Ecological Fiscal Transfer</i> dimana terdapat pengelolaan sebagian keuntungan untuk biaya operasional menjaga alam dan lingkungan setempat.		kelestarian lingkungan setempat melalui skema Ecological Fiscal Transfer (EFT).	
--	--	--	--	--



3.	Dokumen rencana kerja teknis di kampung untuk 2 model Pengembangan Wisata Berkelanjutan: - Kampung Klaogin di Distrik Seremuk untuk Wisata Sungai & Pengamatan Satwa. - Kampung Bariat dan Kampung Nakna di Distrik Konda untuk Eduwisata & Pengamatan Satwa - Kerangka kerja praktis (pragmatis) untuk pengembangan skema <i>Ecological Fiscal Transfer</i>, misal <i>Sharing Pembiayaan Lingkungan, Biodiversity dan Carbon Credits</i> dari kegiatan pariwisata	30/08/2025	Mengidentifikasi perencanaan, penganggaran, termasuk kebutuhan alat dan prasarana pengembangan wisata berkelanjutan di kampung. Rencana Pengembangan Usaha Wisata meliputi: - Pemetaan potensi daya tarik wisata, fasilitas, aksesibilitas, dan penunjang - Rekomendasi Konsep pengembangan kampung wisata - Rekomendasi potensi usaha wisata - Rekomendasi pasar potensial untuk produk wisata - Rekomendasi kapasitas pelaku yang diperlukan - Rekomendasi pemanfaatan ruang dan penataan fasilitas pariwisata - Usulan program kerja pengelolaan usaha wisata - Informasi terkait Daya Dukung Pengembangan wisata Berkelanjutan dan tata ruang pemanfaatan di Kampung. - Mengidentifikasi potensi kerangka kerja <i>Ecological Fiscal Transfer</i>, misal <i>sharing pembiayaan lingkungan, Biodiversity dan Carbon Credits</i> untuk melindungi hutan, sungai dan keragaman hayati.	10%
4.	Modul pembelajaran untuk training & Laporan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas terkait, pengelolaan daya Tarik wisata, kelembagaan, praktik tata kelola yang baik, pengembangan produk kegiatan wisata,	30/10/2025	Menyusun modul training dan melaksanakan pelatihan untuk memberikan pengertian tentang: - Pengembangan pariwisata berkelanjutan - Struktur lembaga dan tugas lembaga dalam pengelolaan daya tarik wisata	10%



	kepemanduan, CHSE, digitalisasi, resiliensi, membangun brand dan promosi. Pelatihan ini akan menggunakan modul dari deliverable 1 (satu).		c. Kode etik wisatawan, dan SOP pengelola. d. Mengidentifikasi usaha wisata dan potensi pasar e. Mengembangkan dan menyelenggarakan produk. f. Kemampuan teknis bagi peserta dalam kepemanduan (eko)wisata dan SOP pemandu wisata. g. Kemampuan teknis untuk mengelola keuangan dan administrasi usaha, pelaporan serta menyusun SOP pengelolaan usaha. h. Kemampuan teknis bagi peserta untuk membuat promosi sederhana menggunakan media sosial tersebut (copywriting, photo dan video sederhana dengan HP, kamera profesional, drone, Canva, dan VN), termasuk membuat rencana promosi. Peserta pelatihan ini adalah kelompok sadar wisata, pemerintah kampung, tokoh adat atau marga, pelaku usaha dan kelompok sadar wisata, dan pengelola BUMKAM.	
5.	Dokumen analisis operasional terkait pelayanan prima, tata kelola yang baik, kelembagaan, fasilitas dan amenities, CHSE, strategi marketing serta <i>sharing profit antar pihak yang terlibat</i>.	30/12/2025	Soft launching (<i>Trial Visit Tour</i>) uji coba produk wisata berkelanjutan di Kampung Klaogin.	10%
5.	Dokumen pembentukan Badan Usaha Kampung (BUMKAM) atau entitas usaha lain Milik Bersama di Klaogin yang terdiri atas Kampung Klaogin, Woloin,	30/02/2026	Mendorong dan mengawal pembentukan BUMKAM atau entitas usaha lain milik bersama untuk pengelolaan usaha (eko)wisata yang berkelanjutan.	10%

	Kakas, dan Kanolo untuk pengembangan usaha (eko)wisata.			
6.	Dokumen pembentukan Badan Usaha Kampung (BUMKAM) atau entitas usaha lain Milik Bersama yang terdiri atas Kampung Bariat dan Nakna untuk pengembangan usaha (edu)wisata.	30/03/2026	Mendorong dan mengawal pembentukan BUMKAM atau entitas usaha lain milik bersama untuk pengelolaan usaha (edu) wisata yang berkelanjutan.	10%
7.	Modul pembelajaran untuk training & Laporan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas terkait, pengelolaan daya Tarik wisata, kelembagaan, praktik tata kelola yang baik, pengembangan produk kegiatan wisata, kependudukan, CHSE, resiliensi, digitalisasi, membangun brand dan promosi serta financial literacy termasuk akses perbankan yang aman untuk rumah tangga dan usaha wisata. Pelatihan ini akan menggunakan 1 modul atau lebih dari deliverable 1 (satu).	30/04/2026	Menyusun modul training dan melaksanakan pelatihan untuk memberikan pengertian tentang: a. Pengembangan pariwisata berkelanjutan b. Struktur lembaga dan tugas lembaga dalam pengelolaan daya tarik wisata c. Kode etik wisatawan, dan SOP pengelola. d. Mengidentifikasi usaha wisata dan potensi pasar e. Mengembangkan dan menyelenggarakan produk. f. Kemampuan teknis bagi peserta dalam kependudukan (eko)wisata dan SOP pemandu wisata. g. Kemampuan teknis untuk mengelola keuangan dan administrasi usaha, pelaporan serta menyusun SOP pengelolaan usaha. h. Kemampuan teknis bagi peserta untuk membuat promosi sederhana menggunakan media sosial tersebut (copywriting, photo dan video sederhana dengan HP, kamera profesional, drone, Canva, dan VN), termasuk membuat rencana promosi.	10%

			i. Kemampuan pengelolaan keuangan rumah tangga dan lembaga (financial literacy) termasuk akses perbankan yang aman, bankable. Peserta pelatihan ini adalah kelompok sadar wisata, pemerintah kampung, tokoh adat atau marga, pelaku usaha dan kelompok sadar wisata, dan pengelola BUMKAM.	
8.	Dokumen Peta Jalan Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan di Sorong Selatan dan Policy brief kebijakan.	30/05/2026	a. Melakukan koordinasi dengan para pihak seperti Dinas Pariwisata, BPSKL, KPHP, DLHKP, Dinas Pendidikan & Kebudayaan, <i>private sector</i>, Agen travel, dan pelaku usaha pariwisata lainnya yang potensial. b. Membangun Strategi (Peta Jalan) pengembangan ekowisata berkelanjutan di Sorong Selatan.	10%
9.	Hasil analisis untuk rekomendasi strategis dan follow up praktis dan langkah demi langkah guna mencapai pasar potensial untuk pengembangan wisata berkelanjutan di kampung.	30/06/2026	Menganalisis potensi pasar dan membangun jejaring kerja serta komitmen kerjasama dengan calon pasar potensial termasuk list lembaga atau komunitas khusus wisata untuk pengembangan perluasan pasar dan mengusahakan keanggotaan entitas wisata Sorong Selatan ke dalam jejaring pariwisata nasional dan internasional.	10%

H. Kualifikasi Minimum

1. Konsultan dapat berupa institusi, lembaga, atau tim yang terdiri 3-5 individu dan akan bertanggung jawab atas pekerjaan yang diselesaikan dengan semua hasil yang dihasilkan.
2. Konsultan harus memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas di bidang pengembangan Pariwisata, lingkungan dan sosial ekonomi, serta strategi pengembangan usaha khususnya usaha pariwisata di masyarakat adat dengan kualifikasi sebagai berikut:



- a. Latar belakang pendidikan: Ilmu Pariwisata, lingkungan atau bidang lain yang sesuai.
- b. Memiliki *track record* pengalaman yang baik dalam memfasilitasi pengembangan usaha wisata berkelanjutan dengan metodologi dan strategi yang jelas, kuat, dan tervalidasi sesuai konteks lapangan.
- c. Dapat menunjukkan kemampuan untuk memberikan hasil yang berkualitas tinggi dalam tenggat waktu yang terbatas dan berpengalaman bekerja di lingkungan multi budaya.
- d. Berpengalaman kerja bersama komunitas masyarakat adat, istimewa dalam pengembangan usaha.
- e. Memiliki keahlian khusus dalam analisis produk wisata, analisis pasar, manajemen usaha dan asesmen resiko.
- f. Memiliki pemahaman yang baik tentang hukum dan regulasi yang sesuai dengan pengembangan usaha pariwisata.
- g. Memiliki keterampilan menulis dan berbicara dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.

PERSYARATAN PENGAJUAN PROPOSAL

- Proposal harus disusun sesuai format yang telah ditentukan dalam **Bahasa Indonesia** dan dikirimkan berbentuk file **.pdf**.
- Semua proposal harus menyertakan:
 - a. Profil dan status lembaga.
 - b. Referensi yang relevan untuk membuktikan kualifikasi teknis dan pengalaman internasional.
 - c. CV personel kunci yang akan memberikan layanan konsultasi yang dijelaskan dalam kerangka acuan ini.
 - d. Anggaran terperinci.
 - e. Rencana kerja merinci metode dan pendekatan yang akan digunakan untuk melaksanakan setiap tugas, sarana pengumpulan/analisis, dan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan.
- Proposal harus dikirim melalui e-mail kepada smachmud@conservation.org dan grantscontracts@konservasi-id.org dan diterima sebelum atau paling lambat di tanggal **30 Juni 2025** pukul **17:00 WIB** dengan subjek e-mail: "**Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Sorong Selatan**".
- Hanya proposal yang masuk *shortlist* yang akan diundang untuk wawancara.
- Klarifikasi atau pertanyaan dapat dikirim ke smachmud@conservation.org dan grantscontracts@konservasi-id.org dan akan dibalas secara tertulis.
- Sebelum tanggal **30 Juni**, KI dapat, untuk alasan apa saja, melakukan perubahan atas RfP ini, dengan amandemen yang akan dipasang di *website* KI atau dikomunikasikan melalui e-mail.

FORMAT PROPOSAL

- Halaman sampul ditandatangani dengan informasi kontak

- *Attachment 1 (Representation of Transparency, Integrity, Environmental and Social Responsibility)* yang telah ditandatangani
- Profil dan status perusahaan/instansi/lembaga
- **Proposal teknis:**
 - Kemampuan, Pengalaman, Kinerja Masa Lalu, dan 3 referensi klien:** Sertakan deskripsi proyek atau tugas serupa dan setidaknya tiga referensi klien.
 - Kualifikasi Personel Kunci:** Lampirkan CV yang menunjukkan bagaimana tim yang diusulkan memenuhi persyaratan minimum yang tercantum pada bagian 'Kualifikasi Minimum'.
 - Pendekatan Teknis, Metodologi, dan Rencana Kerja Tingkat Tinggi:** Proposal Teknis harus menjelaskan secara rinci bagaimana pengaju bermaksud untuk melaksanakan persyaratan yang dijelaskan dalam table Luaran.
- **Proposal biaya:** Disusun dengan format di *Attachment 2 (Cost Proposal Template)*.

KRITERIA EVALUASI

Untuk mengevaluasi proposal, KI akan mencari calon yang paling kuat secara teknis dengan anggaran yang tepat, menggunakan detail kriteria pada Tabel 2.

Tabel 2. Kriteria evaluasi proposal yang diajukan.

Kriteria Evaluasi	Skor
Apakah pendekatan dan metodologi yang diusulkan sesuai dengan penugasan dan praktis dalam keadaan proyek yang berlaku?	30%
Apakah presentasinya jelas dan apakah urutan kegiatan dan perencanaannya logis, realistis, dan menjanjikan implementasi yang efisien untuk proyek?	25%
Apakah kinerja pengaju di masa lalu menunjukkan pengalaman yang terbukti baru-baru ini melakukan pekerjaan serupa?	10%
Apakah pengaju dan personel yang diusulkan memiliki keahlian teknis khusus untuk penugasan tersebut?	15%
Biaya: Biaya yang diusulkan masuk akal dan realistis, mencerminkan pemahaman yang kuat tentang penugasan.	20%

TATA WAKTU

Tata waktu dalam pengajuan proposal disajikan pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Tata waktu.

Tata Waktu	Tanggal
Iklan dipublikasikan	18 Juni 2025
Klarifikasi dikirim kepada KI	20 Juni 2025
Klarifikasi kepada kandidat	21 Juni 2025
Proposal harus diterima oleh KI	23 Juni 2025
Wawancara (apabila diperlukan)	25 Juni 2025
Seleksi final	27 Juni 2025

RESULTING AWARD

KI mengantisipasi penandatanganan perjanjian dengan pengaju terpilih paling lambat tanggal **10 Juli 2025**. Setiap perjanjian yang dihasilkan akan tunduk pada syarat dan

ketentuan Perjanjian Layanan KI. Model bentuk perjanjian dapat diberikan berdasarkan permintaan. RfP ini tidak mewajibkan KI untuk menandatangani kontrak, dan juga tidak mewajibkan KI untuk membayar biaya apapun yang timbul dalam persiapan atau pengajuan proposal. Selain itu, KI berhak untuk menolak setiap dan semua pengajuan, jika tindakan tersebut dianggap demi kepentingan terbaik KI. KI akan, atas kebijakannya sendiri, memilih proposal terpilih dan tidak berkewajiban untuk membagikan hasil penilaian proposal.

KERAHASIAAN

Semua informasi hak milik yang diberikan oleh pengaju akan diperlakukan sebagai rahasia dan tidak akan dibagikan kepada calon pengaju lainnya selama proses pengajuan. Hal ini termasuk namun tidak terbatas pada pengajuan harga, proposal biaya, dan proposal teknis. KI dapat, tetapi tidak diwajibkan untuk, mengumumkan hasil seleksi proposal di situs KI setelah proses seleksi selesai dan kontrak diberikan kepada pengaju terpilih. Hasil evaluasi KI bersifat rahasia dan hasil penilaian tidak akan dibagikan kepada para pengaju.

KODE ETIK

Semua pengaju diharapkan untuk menerapkan standar perilaku tertinggi dalam mempersiapkan, mengajukan, dan jika terpilih, pada akhirnya melaksanakan pekerjaan yang ditentukan sesuai dengan Kode Etik KI. Reputasi KI berasal dari komitmen kami terhadap nilai-nilai kami: Integritas, Rasa Hormat, Keberanian, Optimisme, Semangat, dan Kerja Sama Tim. Kode Etik KI ("Kode Etik") memberikan panduan bagi karyawan KI, penyedia jasa, tenaga ahli, peserta magang, dan sukarelawan dalam menghayati nilai-nilai inti KI, serta menguraikan standar minimum perilaku etis yang harus ditaati oleh semua pihak. Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik, serta kekhawatiran mengenai integritas proses dan dokumen pengadaan harus dilaporkan kepada KI melalui email grantscontracts@konservasi-id.org.

Attachment 1: Representation of Transparency, Integrity, Environmental and Social Responsibility

All Offerors are expected to exercise the highest standards of conduct in preparing, submitting and if selected, eventually carrying out the specified work in accordance with KI's Code of Ethics. KI's Code of Ethics provides guidance to KI employees, service providers, experts, interns, and volunteers in living KI's core values, and outlines minimum standards for ethical conduct which all parties must adhere to. Any violations of the Code of Ethics should be reported to KI via its email at grantscontracts@konservasi-id.org.

KI relies on the personal integrity, good judgement, and common sense of all third parties acting on behalf, or providing services to the organization, to deal with issues not expressly addressed by the Code or as noted below.

I. With respect to KI's Code of Ethics, we certify:

- a. We understand and accept that KI, its contractual partners, grantees and other parties with whom we work are expected to commit to the highest standards of Transparency, Fairness, and Integrity in procurement.

II. With respect to social and environmental standards, we certify:

- a. We are committed to high standards of ethics and integrity and compliance with all applicable laws across our operations, including prohibition of actions that facilitate trafficking in persons, child labor, forced labor, sexual abuse, exploitation or harassment. We respect internationally proclaimed human rights and take no action that contributes to the infringement of human rights. We protect those who are most vulnerable to infringements of their rights and the ecosystems that sustain them.
- b. We fully respect and enforce the environmental and social standards recognized by the international community, including the fundamental conventions of International Labour Organization (ILO) and international conventions for the protection of the environment, in line with the laws and regulations applicable to the country where the contract is to be performed.

III. With respect to our eligibility and professional conduct, we certify:

- a. We are not and none of our affiliates [members, employees, contractors, subcontractors, and consultants] are in a state of bankruptcy, liquidation, legal settlement, termination of activity, or guilty of grave professional misconduct as determined by a regulatory body responsible for licensing and/or regulating the offeror's business

- b.** We have not and will not engage in criminal or fraudulent acts. By a final judgment, we were not convicted in the last five years for offenses such as fraud or corruption, money laundering or professional misconduct.
- c.** We are/were not involved in writing or recommending the terms of reference for this solicitation document.
- d.** We have not engaged in any collusion or price fixing with other offerors.
- e.** We have not made promises, offers, or grants, directly or indirectly to any KI employees involved in this procurement, or to any government official in relation to the contract to be performed, with the intention of unduly influencing a decision or receiving an improper advantage.
- f.** We have taken no action nor will we take any action to limit or restrict access of other companies, organizations or individuals to participate in the competitive bidding process launched by KI.
- g.** We have fulfilled our obligations relating to the payment of social security contributions or taxes in accordance with the legal provisions of the country where the contract is to be performed.
- h.** We have not provided, and will take all reasonable steps to ensure that we do not and will not knowingly provide, material support or resources to any individual or entity that commits, attempts to commit, advocates, facilitates, or participates in terrorist acts, or has committed, attempted to commit, facilitate, or participated in terrorist acts, and we are compliant with all applicable Counter-Terrorist Financing and Anti-Money Laundering laws (including USA Patriot Act and U.S. Executive Order 13224).
- i.** We certify that neither we nor our directors, officers, key employees or beneficial owners are included in any list of financial or economic sanctions, debarment or suspension adopted by the United States, United Nations, the European Union, the World Bank, or General Services Administration's List of Parties Excluded from Federal Procurement or Non-procurement programs in accordance with E.O.s 12549 and 12689, "Debarment and Suspension".

Name : _____

Signature : _____

Title : _____

Date : _____

Attachment 2: Cost Proposal Template

The cost proposal must be all-inclusive of profit, fees or taxes. Additional costs cannot be included after award, and revisions to proposed costs may not be made after submission unless expressly requested by KI should the offerors proposal be accepted. Nevertheless, for the purpose of the proposal, Offerors must provide a detailed budget showing major expense line items. Offers must show unit prices, quantities, and total price. All items, services, etc. must be clearly labeled and included in the total offered price. All cost information must be expressed in **IDR**.

If selected, Offeror shall use its best efforts to minimize the financing of any taxes on goods and services, or the importation, manufacture, procurement, or supply thereof. If Offeror is eligible to apply for refunds on taxes paid, Offeror shall do so. Any tax savings should be reflected in the total cost.

Cost Breakdown by Deliverable

Deliverable	Price (Lump Sum, All Inclusive)

Cost Breakdown by Cost Component

Description	Unit of measure (day, month etc)	Total period of engagement	Unit cost/rate	Total Cost for the Period
Total Cost of Financial Proposal				